



# **RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**2018-2023**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Strategis Perubahab Tahun 2018 – 2023 ini dapat tersusun. Dokumen Rencana Strategis Perubahan ini adalah dokumen perubahan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat untuk 2 tahun ke depan. Penetapan Rencana Strategis adalah deskripsi dari tujuan yang bisa diukur yang akan dicapai secara nyata dalam periode 5 tahun. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus spesifik, terinci dan dapat diukur.

Disadari bahwa Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018 - 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang disusun ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, diharapkan saran/ masukkan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis Perubahan yang disusun ini dapat memberikan manfaat yang baik dan menjadi pedoman/ acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Pontianak, Februari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



  
**SAMUEL, SE, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660408 199303 1 009



---

---

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Landasan Hukum .....	8
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra .....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II Gambaran Pelayanan SKPD .....</b>	<b>12</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD .....	12
2.2. Sumber Daya OPD .....	35
2.3. Kinerja Pelayanan OPD .....	44
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD .....	45
<b>BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis OPD .....</b>	<b>47</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD .....	47
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	47
3.3. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Provinsi Kalimantan Barat .....	49
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	50
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	50



<b>BAB IV Tujuan dan Sasaran .....</b>	<b>52</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD .....	52
<b>BAB V Strategi dan Arah Kebijakan .....</b>	<b>54</b>
<b>BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....</b>	<b>57</b>
6.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	57
6.2. Pendanaan Indikatif .....	72
<b>BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB VIII Penutup .....</b>	<b>83</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perubahan memuat penyesuaian perencanaan berbasis kinerja karena adanya perubahan terkait penyusunan perencanaan berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang memberikan panduan terhadap hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul. RENSTRA Perubahan ini menjadi acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka mencapai indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja dan target Kepala Daerah, khususnya untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat terkait Urusan Komunikasi dan Infomatika, Persandian dan Statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat merupakan OPD yang baru dibentuk tahun 2017. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014, dimana terdapat pembagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik.

Diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah. Adapun urusan yang diserahkan kepada daerah



mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014, membagi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan dibagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Urusan Non pelayanan dasar terdapat 18 urusan yang diantaranya terdapat urusan, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya diperkuat juga melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adanya Perda tersebut selanjutnya dibentuk Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 124) sebagai acuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan yaitu komunikasi dan informatika, diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Selain itu, diharapkan pula masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kalimantan Barat.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui



kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayanan masyarakat.

Kondisi saat ini, pengaruh global Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempengaruhi seluruh sektor kehidupan manusia (sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dll). Salah satunya kemudahan pertumbuhan ekonomi dan penyebaran informasi secara luas, baik dalam lingkup lokal/regional/global. Pesatnya perkembangan informasi yang tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi. Kondisi demikian tentu menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Kewenangan lainnya yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu urusan persandian. Persandian merupakan kegiatan di bidang pengamanan berita yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada profesi sandi. Saat ini, terjadi perubahan paradigma dan arah penyelenggaraan persandian di daerah diantaranya persandian tidak hanya sekedar terima dan kirim berita, tidak hanya melayani kepala daerah dan persandian tidak hanya terbatas pada informasi rahasia.

Peran persandian dalam pengamanan informasi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), keaslian (*authentication*), dan tidak ada pengingkaran (*non repudiation*) informasi yang disandikan. Seiring perkembangan TIK, sangat diperlukan peran persandian yang memberikan jaminan keamanan informasi guna mewujudkan ketahanan informasi nasional dalam menjaga kedaulatan NKRI. Selain itu, dengan terjaminnya



keamanan informasi pemerintah daerah, persandian turut berkontribusi terhadap kelancaran pembangunan daerah.

Selain melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik. Kegiatan statistik merupakan kegiatan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, pengembangan ilmu statistik, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya dari 3 jenis statistik, terdapat jenis statistik yang penyelenggaraannya kewenangannya terdapat di daerah yaitu statistik sektoral yang penyelenggaraannya dikumpulkan oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 pasal 1 angka 6, penyelenggaraan statistik sektoral pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di pandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis tahun 2018 – 2023. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 sampai tahun 2023. Rencana strategis akan menentukan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah dan tolok ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia





- Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan



- Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1003);
  17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
  18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi



- Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
  23. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 6);
  26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019



- Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 71);
  29. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA**

Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 disusun sebagai acuan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Merupakan satu acuan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD.
2. Menyediakan satu tolak untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Organisasi Perangkat Daerah.
3. Agar lebih dapat memahami tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 adalah:



1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
2. Mempertegas adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program pembangunan Komunikasi dan Informatika di Kalimantan Barat yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Dokumen Renstra sebagai tolok ukur atau parameter dalam menentukan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Tahunan.
4. Dokumen Renstra sebagai pedoman dan acuan dalam implementasi pembuatan dokumen rencana kerja dalam menentukan anggaran yang berbasis pada kinerja

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.



#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas fungsi sampai dengan satu eselon di bawah OPD. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.2. Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup Sumber Daya Manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Kabupaten/Kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan



pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB VI RENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BAB VIII PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan program kerja di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- b. perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;





- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 124 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- b. perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika serta persandian dan statistik;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan dinas;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan asset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas.
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

### 3. Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan



Aparatur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.



#### 4. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.



➤ Bidang Informasi Publik

Bidang Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang informasi publik.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Informasi Publik;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial), pengumpulan pendapat umum (survei/jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat, layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah provinsi, layanan pengaduan masyarakat, fasilitasi Komisi Informasi Provinsi (KIP), fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik; dan





j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Bidang Komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Komunikasi Publik;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. pelaksanaan kegiatan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/ media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah provinsi, penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah provinsi, pengembangan sumber daya komunikasi publik, serta layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik;
  - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bidang Aplikasi Informatika
- Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang aplikasi informatika. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Bidang Aplikasi Informatika;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;



- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, layanan pusat Application Program Interface (API), serta sistem pencegahan korupsi terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan kegiatan di bidang tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, pengelolaan layanan nama domain, sub domain lembaga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pelayanan publik dan kegiatan di provinsi, pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smart city), layanan sistem informasi smart city, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smart city, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta pengembangan aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- f. pelaksanaan kegiatan di bidang Government Chief Information Officer (GCIO) dan pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government kabupaten/kota, koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah, integrasi pengelolaan TIK dan e-government pemerintah daerah kabupaten/kota, pengembangan aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, pengembangan masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city, implementasi e-government dan smart city, promosi pemanfaatan layanan smart city, serta fasilitasi pengembangan ekonomi digital/e-commerce sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah daerah serta pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan disaster recovery center (DRC), pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-government, pengembangan SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, government cloud computing, pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah, serta fasilitasi pelayanan KPU/USO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- h. pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang aplikasi informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



➤ Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang persandian dan statistik. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Persandian dan Statistik;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi, layanan monitoring trafik elektronik, penanganan insiden keamanan informasi, pengembangan SDM di bidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, bimbingan teknis keamanan informasi dan persandian, serta layanan filtering konten negatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. penyelenggaraan satu data Indonesia, identifikasi kebutuhan data, membangun rancangan pengumpulan data dan implementasi rancangan penghimpunan data, penghimpunan data di lapangan dan data perangkat daerah, integrasi data klasifikasi, penginputan, penimbang, estimasi dan agregat data, pengelolaan hasil pengolahan data, penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan, recovery data dan informasi survei untuk penyediaan data statistik sektoral, koordinasi dengan BPS dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, penyediaan peralatan infrastruktur, penyajian data statistik sektoral, penyelenggaraan forum data dan wali data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;





- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Persandian dan Statistik membawahi :

- a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. Seksi Analisis Data Statistik.

#### 5. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi;



- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang persandian dan keamanan informasi, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi, layanan monitoring trafik elektronik, penanganan insiden keamanan informasi, pengembangan SDM di bidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, bimbingan teknis keamanan informasi dan persandian, serta layanan filtering konten negatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi; dan



h. pelaksanaan fungsi lain di bidang persandian dan keamanan informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### 6. Seksi Analisis Data Statistik

Seksi Analisis Data Statistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang analisis data statistik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Analisis Data Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Analisis Data Statistik;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis data statistik;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang analisis data statistik;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang analisis data statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;



- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang analisis data statistik yang diserahkan oleh Kepala Bidang

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada angka (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.



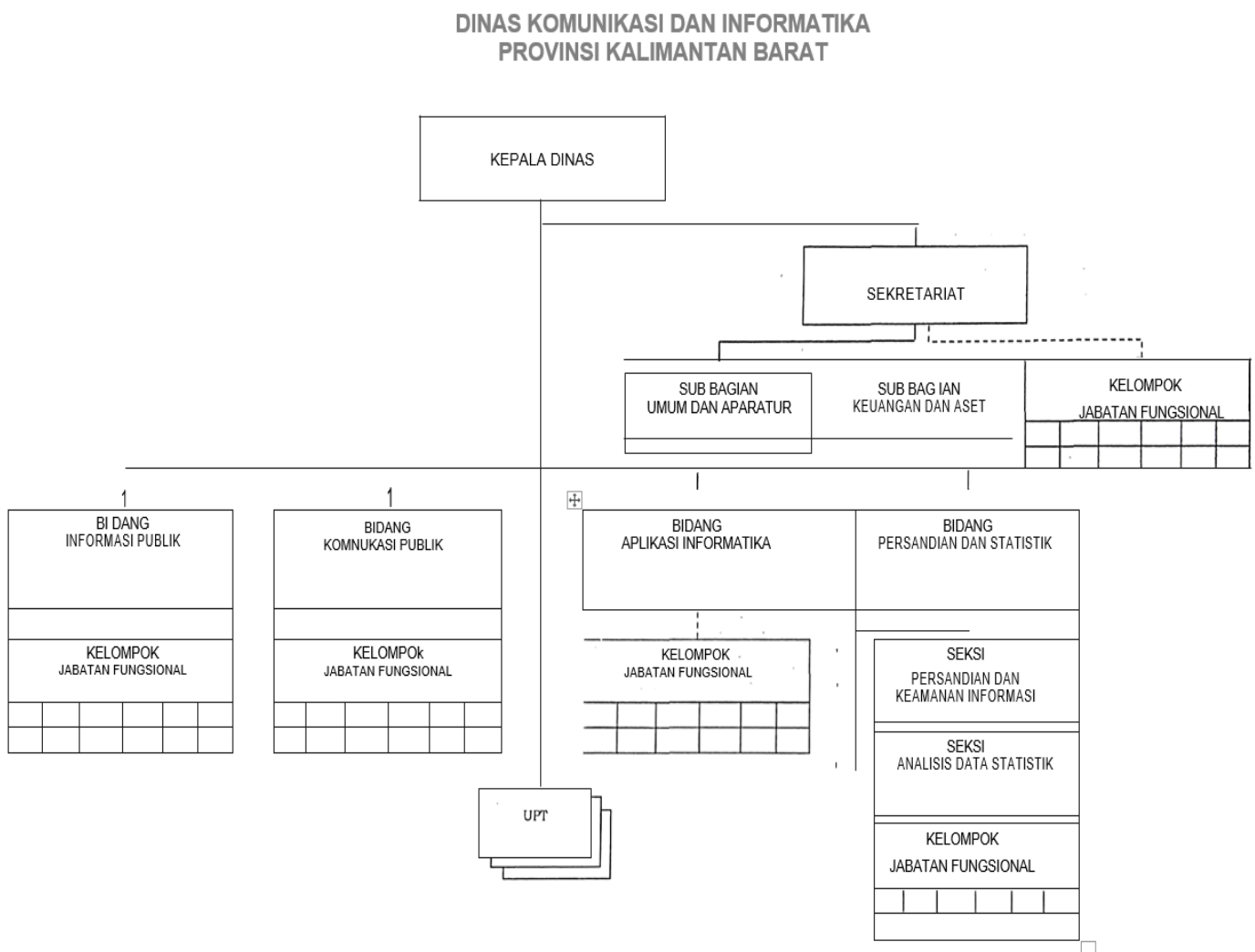
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada angka (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada angka (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (9) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (10) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki



disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkanya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

(11) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

Adapun struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1. berikut.





Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja yang diamanatkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh kondisi sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dan sumber dana.

## 2.2. Sumber Daya OPD

### a. Sumber Daya Aparatur

Jumlah personil yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat per Desember 2021 berjumlah 54 orang, dengan susunan sebagai berikut :

- Eselon II Berjumlah 1 (satu) orang
- Eselon III Berjumlah 5 (lima) orang
- Eselon IV Berjumlah 14 (empat belas) orang
- Staf non eselon Berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang

**Tabel 2.1**  
**PEJABAT STRUKTURAL DISKOMINFO PROV. KALIMANTAN BARAT**

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan	Diklat Struktural	Jenis Kelamin	Ket .
1)	Samuel, SE., M.Si 19660408 199303 1 009	Pembina Utama Madya / IVd	Kepala Dinas	Strata 2	SPAMA Teknis Fungsional Dinas Staf	L	
2)	D Zamroni, S.Stp, M.Si 19800307 199810 1 001	Pembina / IVa	Sekretaris	Strata 2	ADUM Diklat Teknis Keprotokolan	L	
3)	Agus Hasim, ST,M.Si 19660824 199803 1 006	Pembina / IVa	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Strata 2	DIKLATPIM TK III Tata Cara Pengadaan Jasa Konst Pejabat Anti Proyek	L	
4)	Sofiarti Dyah Anggunia, St, M.Sc 19840223 200604 2 012	Pembina / IVa	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Strata 2	Penlat Manajemen Pengadaan barang Dan Jasa	P	
5)	Drs. Dudi Nugraha Rasika 19740803 199403 1 001	Pembina / IVa	Kepala Bidang Informasi Publik	Strata 1	Adum	L	
6)	Maria Wijayanti, ST,MT 19730105 200212 2 001	Pembina Tk.I / IVb	Kepala Bidang Komunikasi Publik	Strata 2	Diklatpim Tk.II	P	
7)	Sylvia Josepha Maria Pessy, S.IP, MT 19690218 198903 2 005	Pembina / IVa	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	Strata 2	Diklatpim Tk.IV Diklat Karakterdas	P	



No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan	Diklat Struktural	Jenis Kelamin	Ket .
8)	Hendra, S.Sos, M.Si 19690612 199003 1 003	Pembina / IVa	Kepala Seksi Analisis Data Statistik	Strata 2	Diklatpim Tk.IV Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah	L	
9)	Heronimus Sonni S.Kom 19780222 201101 1 002	Penata Tk. I/IIId	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Strata 1	Diklatpim TK.IV	L	
10)	Agus Leo Racmatillah, S.Kom 19820813 201001 1 002	Panata /IIIc	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Strata 1	Pelatihan Kader Bina Damai Bagi ASN	L	
11)	Wiwin Sutiana, ST 19760903 200501 1 008	Penata Tk. I/ IIIId	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Strata 1		L	
12)	Purnamawati, SH 19640622 198511 2 002	Penata TK I (III/d)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Strata 1		P	
13)	Mariasyih, S.Sos 19651112 199203 2 007	Penata Tk. I/ IIIId	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Strata 1	Penlat Manajemen Pengadaan barang Dan Jasa	P	
14)	Arry Yosfani Alnur, S.Kom 19760430 200604 1 004	Penata Tk. I/ IIIId	Pranata Komputer Ahli Muda	Strata 1		L	
15)	Tedolus Teddy Hinggaan, ST 19790502 201101 1 002	Penata / IIIc	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Strata 1		L	
16)	Evi Tanderi, S.Pd, M.Si	Pembina/ IVa	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Strata 2	Pengelolaan Keuangan Daerah	P	
17)	Arif Setia Putra, S.Kom, MM 19860216 201001 1 005	Penata/ III c	Sub Bagian Umum Dan Aparatur	Strata 2	Workshop Pengembangan Kompetensi PNS	L:	
18)	Calvario Mandayu, S.STP,M.Si 19900413 201010 1 001	Penata /III c	Pranata Komputer Ahli Muda	Strata 2	Penyusunan Renja KPD	L	
19)	Evi Kusuma, ST 19770209 201101 2 002	Penata/IIIc	Statistisi	Strata 1	Prajabatan Pelatihan Manajem Pengadaan Barang/Jasa	P	
20)	Meidy Vinandar Pratama, S.STP	Penata Muda TK I	Pranata Komputer Ahli	Strata 1		L	





No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan	Diklat Struktural	Jenis Kelamin	Ket
	19920510 201406 1 001	(III/b)	Muda				

\*Bagian Umum Aparatur Diskominfo Prov. Kalbar Desember 2021

#### b. Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk mendukung dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat terletak di Jalan Adisucipto Nomor 50 Pontianak dengan menggunakan gedung 3 (tiga) lantai, di lantai pertama gedung Diskominfo Prov. Kalbar terdapat aula pertemuan yang dapat menampung  $\pm$  100 orang dan lantai ketiga gedung terdapat Ruang Command Centre Provinsi Kalimantan Barat.

Telah tersedia beberapa sarana dan prasarana yang digunakan dalam kondisi baik yang terdiri dari :

**Tabel : 2.2**  
**Sarana dan Prasarana**  
**Di Diskominfo Prov. Kalbar Tahun 2021**

No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)	3	Unit	Alat Angkutan
2	Kendaraan Roda 2 (Dua)	2	Unit	Alat Angkutan
3	Stationary Water Pump (Mesin Air)	2	Unit	Pompa
4	Lemari Besi/Metal	38	Unit	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
5	Rak Besi/Metal	8	Unit	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
6	Filling Besi/Metal	15	Unit	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
7	Brankas	2	Unit	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
8	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	10	Buah	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor



No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
9	Alat Penghancur Kertas	6	Unit	Alat Kantor Lainnya
10	Papan Nama Instansi	1	Buah	Alat Kantor Lainnya
11	Papan Tulis	1	Buah	Alat Kantor Lainnya
12	White Board	1	Unit	Alat Kantor Lainnya
13	Mesin Absensi	2	Unit	Alat Kantor Lainnya
14	Alat Sidik Jari	3	Unit	Alat Kantor Lainnya
15	Rak Kayu	3	Buah	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
16	Meja Kayu/Rotan	1	Buah	Meubelair
17	Kursi Besi/Metal	16	Buah	Meubelair
18	Meja Rapat	52	Buah	Meubelair
19	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Set	Meubelair
20	Meja Rapat Pejabat Eselon III	3	Buah	Meubelair
21	Meja Podium	1	Buah	Meubelair
22	Kursi Rapat (Command Centre)	15	Buah	Meubelair
23	Kursi Tamu	29	Buah	Meubelair
24	Kursi Tangan	37	Buah	Meubelair
25	Kursi Putar	10	Buah	Meubelair
26	Kursi Biasa	43	Buah	Meubelair
27	Meja Komputer	3	Unit	Meubelair
28	Tikar/Karpet	4	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
29	Sofa	5	Set	Meubelair



No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
30	Lemari ES	1	Buah	Alat Pendingin
31	AC Standing	2	Unit	Alat Pendingin
32	AC Split	58	Unit	Alat Pendingin
33	Kipas Angin	3	Buah	Alat Pendingin
34	Kitchen Set	1	Set	Alat Dapur
35	Toren Air	1	Buah	Alat Dapur
36	Televisi	44	Unit	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
37	Lambang Garuda Pancasila	2	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
38	Tiang Bendera (Mini)	2	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
39	Tangga Alumunium	2	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
40	Dispenser	1	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
50	Gorden	7	Set	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
51	Bracket Gantung	2	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
52	PC Unit	106	Unit	Personal Komputer
53	Lap Top	31	Unit	Personal Komputer
54	Note Book/NetBook	12	Unit	Personal Komputer
55	Palm Top	10	Unit	Personal Komputer
56	Hard Disk	46	Buah	Peralatan Personal Komputer
57	Printer	43	Unit	Peralatan Personal Komputer
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah	Meubelair
59	Meja Kerja Pejabat Eselon III	11	Buah	Meubelair



No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	35	Buah	Meubelair
61	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	127	Buah	Meubelair
62	Meja Operator	8	Buah	Meubelair
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Meubelair
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	44	Buah	Meubelair
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17	Buah	Meubelair
66	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	132	Buah	Meubelair
67	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	1	Buah	Meubelair
68	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	15	Buah	Meubelair
69	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	26	Buah	Meubelair
70	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Set	Meubelair
71	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	3	Set	Meubelair
72	Meja Panjang	5	Buah	Meubelair
73	Buffet Kaca	2	Buah	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
74	Laser Pointer	1	Unit	Alat Kantor Lainnya
75	Scanner	4	Unit	Peralatan Personal Komputer
76	LCD Projector/Infocus	17	Unit	Alat Kantor Lainnya
77	Compact Disc Player	2	Unit	Peralatan Studio Audio
78	Uninterruptible Power Supply (UPS)	75	Unit	Peralatan Studio Audio
79	Drone	1	Unit	Peralatan Studio (Kamera Udara)
80	CCTV (Camera Control Television System)	14	Unit	Alat Kantor Lainnya



No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
81	Wireless	10	Buah	Peralatan Jaringan
82	Camera Digital	9	Unit	Peralatan Studio Video Dan Film
83	Handy Cam	3	Unit	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
84	Monitor	2	Unit	Peralatan Personal Komputer
85	Digitizer	1	Unit	Peralatan Personal Komputer
86	Memory	31	Buah	Peralatan Personal Komputer
87	Peralatan Jaringan	3	Unit	Peralatan Jaringan
88	Server	26	Unit	Peralatan Jaringan
89	Router	31	Buah	Peralatan Jaringan
90	Hub	34	Buah	Peralatan Jaringan
91	Switch	38	Buah	Peralatan Jaringan
92	Client	18	Buah	Peralatan Jaringan
93	Acces Point	141	Buah	Peralatan Jaringan
95	Mouse	21	Buah	Bahan Komputer
96	Leap Motion	2	Unit	Peralatan Personal Komputer
97	Video Processor	15	Unit	Peralatan Studio Video Dan Film
98	Layar Film	1	Buah	Peralatan Studio Video Dan Film
99	Amplifier	3	Unit	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
100	Microphone	17	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
101	Loadspeaker	2	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
102	Sound System	13	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)



No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
103	Telephone (PABX)	13	Buah	Alat Komunikasi
104	Faximile	4	Buah	Alat Komunikasi
105	Unit Pemancar UHF Portable	2	Unit	Peralatan Pemancar UHF
106	Antena SHF Stationary	1	Unit	Peralatan Antena SHF/Parabola
107	Tabung Pemadam Kebakaran/Portable	4	Buah	Alat Pemadam Kebakaran
108	Security Door	1	Buah	Alat Kantor Lainnya
109	Firewall	1	Unit	Peralatan Jaringan
110	Camera Conference	4	Unit	Peralatan Studio Video Dan Film
111	KVM Keyboard Video Monitor	18	Buah	Peralatan Jaringan
112	Generator	1	Unit	Electric Generating Set
113	Lemari Kaca	2	Buah	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
114	Crimping Tolls	3	Buah	Perkakas Standard (Standard Tools)
115	Fusion Splicer	1	Buah	Peralatan Jaringan (Penyambung Serat Optic)
116	Smart Keyboard Ipad Pro	2	Buah	Peralatan Mini Komputer
117	Smart Pencil	2	Buah	Peralatan Mini Komputer
118	Video Splitter	2	Buah	Peralatan Studio Video Dan Film
119	Video Splitter	2	Buah	Peralatan Studio Video Dan Film
120	Kabel HDMI	35	M <sup>2</sup>	Peralatan Studio Audio
121	Kabel Canare	4	M <sup>2</sup>	Peralatan Studio Audio
122	Speaker Komputer	10	Buah	Peralatan Mini Komputer
123	Remote Control Unit	1	Buah	Peralatan Studio Audio



No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
124	Video Monitor	30	Unit	Peralatan Studio Audio
125	Fiber Optic Operating	1	Set	Alat Ukur Instrument Workshop
126	Extender HDMI Tx/Rx	8	Unit	Peralatan Jaringan
127	Tablet PC	1	Unit	Personal Komputer
128	Mini Komputer (Video Wall Controler)	1	Buah	Komputer Jaringan
129	Chairman/Audio Conference	5	Unit	Peralatan Studio Audio
130	Tripod Camera	4	Unit	Peralatan Studio Video Dan Film
131	Lensa Kamera	1	Unit	Peralatan Studio Video Dan Film
132	Thermo Gun	2	Buah	Alat Laboratorium Lainnya (Pengukur Suhu)
133	Camera Video	2	Unit	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
134	Network Cable Tester	1	Buah	Peralatan Jaringan
135	Audio Control Master Unit/Standard VB	1	Buah	Peralatan Studio Audio
136	Audio Maximizer	1	Unit	Peralatan Studio Audio
137	Alat Pengamatan Sinyal (Radio)	1	Unit	Alat Kantor Lainnya

\*Bagian Keuangan dan Aset Diskominfo Prov. Kalbar Desember 2021



### **2.3. Kinerja Pelayanan OPD**

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan program kerja di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
2. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menghadapi beberapa tantangan terhadap kelancaran tugas pokok yang akan berpengaruh terhadap roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya.

Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan Peringkat keterbukaan informasi Provinsi Kalimantan Barat dari “Menuju Informatif” menjadi “Informatif”.
2. Keterbatasan tenaga teknis yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, terutama di daerah Blankspot.
4. Penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk menangkal berita hoax maupun ujaran kebencian.
5. Peningkatan jumlah data statistik sektoral Kalimantan Barat yang sudah terintegrasi dalam satu portal harus terus dilakukan untuk mewujudkan Satu Data dan Open Data Kalbar.
6. Integrasi layanan publik dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menuju *Smart Province*.
7. Peningkatan indeks keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dari “Cukup” menjadi “Baik”.

Ada beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai visi dan misi diantaranya sebagai berikut :

1. Pembinaan terkait implementasi pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui optimalisasi peran PPID Pembantu dan Humas di seluruh OPD terus ditingkatkan.
2. Integrasi Teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan intra pemerintah daerah dan penyediaan internet untuk OPD sudah terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar.



3. Pembangunan BTS (Base Transceiver Station) di wilayah blankspot terus diusulkan setiap tahun kepada Pemerintah Pusat untuk mengurangi daerah Blankspot di Kalimantan Barat.
4. Mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai media komunikasi publik untuk penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah dalam rangka menangkal berita hoax dan ujaran kebencian.
5. Jumlah data statistik sektoral Kalimantan Barat yang sudah terintegrasi dalam Portal Satu Data Kalbar terus meningkat.
6. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemprov Kalbar Tahun 2020 peringkat 2 nasional.



### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Adapun permasalahan yang perlu diantisipasi adalah :

1. Meningkatkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Kalbar;
2. Peningkatan tingkat keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Belum optimalnya Integrasi Sistem Informasi dan Jaringan Internet (WAN);
4. Belum optimalnya Kebijakan Satu Data dan Open Government di Kalimantan Barat ;
5. Masih banyaknya kebutuhan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Wilayah Blankspot di Provinsi Kalimantan Barat;
6. Diseminasi Informasi dan Literasi;
7. Pembinaan Lembaga Media Lokal;
8. Belum optimalnya pembinaan Humas OPD di Lingkungan Pemprov. Kalbar;
9. Masih belum optimalnya integrasi aplikasi dan layanan publik berbasis elektronik dalam rangka mewujudkan Smart Province.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Masa jabatan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Oleh karena itu, kondisi Kalimantan Barat saat ini sebagaimana



telah diuraikan di atas serta visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi, misi, dan arah program kerja lima tahun ke depan (2018-2023).

Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini serta visi, misi, dan arah pembangunan yang tercantum dalam RPJPD tahun 2005-2025, maka visi pembangunan daerah tahun 2018–2023 yang akan direalisasikan adalah:

***“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN  
BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN”***

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudra, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan sosial yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam



kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui enam Misi Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Di antara misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang.

### **3.3. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat**

Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa faktor penghambat dari pelayanan perangkat daerah, yaitu :

1. Masih terbatasnya ASN yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta masih terdapat jumlah staf yang belum mencukupi kebutuhan.
2. Sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) masih kurang.
3. Lemah dan belum tersedianya jaringan informasi dan telekomunikasi di daerah Blankspot.



4. Pengaruh media yang menawarkan kemudahan dalam memberikan informasi, secara tidak langsung mempengaruhi nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat.
5. Ancaman keamanan data dan informasi dalam implementasi SPBE.

Ada beberapa faktor pendorong diantaranya sebagai berikut :

1. Semakin maju dan berkembangnya TIK.
2. Peranan media semakin diperkuat dengan perkembangan teknologi dan jejaring sosial.
3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan adanya kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan data dan informasi.
4. Wawasan dan pengetahuan masyarakat meningkat seiring berkembangnya TIK.
5. Perlunya pengamanan informasi daerah dalam perkembangan TIK.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pendataan dan pemetaan wilayah blankspot secara spasial (dalam bentuk peta) sudah dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kemenkominfo melalui koordinasi perencanaan untuk mendukung pembangunan di Wilayah 3T dan Perbatasan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan pada subbab 3.1 dan telaahan visi dan misi Gubernur serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dijelaskan pada subbab 3.2 dan subbab 3.3, berikut dirumuskan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, adalah :



1. Masih belum optimalnya pelayanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Kalbar untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemprov Kalbar;
3. Masih belum optimalnya Integrasi Sistem Informasi dan Jaringan Internet (WAN) dalam rangka Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Belum optimalnya dataset statistic yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan Kebijakan Satu Data dan Open Government



---

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

##### **a. Tujuan**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu 5 tahun (2018 – 2023). Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat konsisten dengan tugas pokok dan fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dinas dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut yaitu **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi”**

##### **b. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dirumuskan untuk masing-masing tujuan, yaitu:



### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET CAPAIAN						
				KONDISI AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	KONDISI AKHIR
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi	predikat keterbukaan informasi publik	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	predikat dan nilai keterbukaan informasi publik	Informatif 90 - 100	Informatif 90 - 100	Informatif 90 - 100	Informatif / Zona Hijau 90 -100	Informatif / Zona Hijau 90 -100	Informatif / Zona Hijau 90 -100	Informatif / Zona Hijau 90 -100
		Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	2,60	2,60	2,60	2,60-3,50	2,60-3,50	3,50-4,20	3,50-4,20
		Meningkatnya Jumlah Dataset Statistik Sektoral yang Terintegrasi Setiap Tahun	Jumlah Total Dataset Statistik Yang Terintegrasi Per Tahun	1.600	1.600	2.800	4.000	7.000	9.000	9.000
		Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Status Kesiapan Keamanan Informasi : - Baik - Cukup Baik - Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar - Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	Baik	Baik	Baik
		Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Nilai dan Predikat SAKIP OPD	B	B	BB (71,51)	BB (75,50)	BB (76,00)	BB (77,00)	BB (77,00)
			2. Indeks RB OPD	85,00%	88,90% (32,27)	88,90% (32,27)	88,95%	88,97%	89,00%	89,00%



---

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Memberikan pembinaan dan mengarahkan seluruh perangkat daerah agar informatif dalam memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang akan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Mengintegrasikan seluruh data statistik Kalimantan Barat yang valid dan up to date dalam satu portal yang mudah diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mencapai sasaran sesuai visi yang dituju diperlukan strategi tertentu. Strategi tersebut secara garis besar berupaya mengatasi permasalahan internal maupun eksternal dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, berusaha mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan pemetaan interaksi antar faktor melalui analisis SWOT, dapat dirumuskan sejumlah isu strategis yang diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Selanjutnya dari sejumlah isu strategis tersebut, dipilih sejumlah alternatif sebagai sasaran strategis setelah mempertimbangkan beberapa faktor baik urgensi, kemampuan, biaya, kelayakan dan legalitas.



Strategi yang dapat dirumuskan untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan peran PPID pembantu seluruh OPD dalam Keterbukaan Informasi.
2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.
3. Pengintegrasian Data Statistik Sektoral Kalimantan Barat dalam Satu Data.
4. Peningkatan keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan persandian.



### Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan			
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	Peningkatan peran PPID Pembantu dan Humas seluruh OPD dalam pelayanan dan penyebaran informasi untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi	Pembinaan terhadap PPID Pembantu dan Humas pada OPD di Lingkungan Pemprov. Kalbar dalam rangka mengoptimalkan penyebaran dan pelayanan informasi publik
	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik	Mengembangkan inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang akan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
	Meningkatnya Jumlah Dataset Statistik Sektoral yang Terintegrasi Setiap Tahun	Pengintegrasian Data Statistik Sektoral Kalimantan Barat dalam Satu Data	Mengintegrasikan seluruh data statistik Kalimantan Barat yang valid dan up to date dalam satu portal yang mudah diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat
	Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Peningkatan keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan persandian	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Urusan Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Terselenggaranya urusan Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemprov. Kalbar untuk pencapaian kinerja dan reformasi birokrasi	Mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui peningkatan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja



---

---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menetapkan program kerja prioritas yang akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan. Program kerja prioritas ini terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Selain program kerja prioritas, terdapat program kerja yang bersifat menunjang kebutuhan administrasi perkantoran yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Adapun penjelasan secara rinci rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam revisi Rencana Strategis ini yaitu dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**CASCADING PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR**

Tujuan RPJMD	Indikator	SASARAN RPJMD					RENSTRA										PROGRAM			
		Sasaran RPJMD	Indikator	Target			TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET CAPAIAN						PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	
				2021	2022	2023					KONDISI AWAL	2019	2020	2021	2022	2023				KONDISI AKHIR
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi	<b>predikat keterbukaan informasi publik</b>	Informatif / Zona Hijau	Informatif / Zona Hijau	Informatif / Zona Hijau	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi	<b>predikat keterbukaan informasi publik</b>	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	predikat dan nilai keterbukaan informasi publik	90 - 100	90 - 100	90 - 100	90 -100	90 -100	90 -100	90 -100	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	1.Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik perangkat daerah	persentase OPD dengan zona hijau / nilai 85 - 100
																			2. Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan komunikasi publik perangkat daerah	Persentase media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD
			<b>predikat penilaian SPBE</b>	Baik	baik	sangat baik			Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	2,60	2,60	2,60	2,60-3,50	2,60-3,50	3,50-4,20	3,50-4,20	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Terselenggaranya implementasi tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang optimal	persentase total bobot domain evaluasi SPBE
			<b>integrasi data statistik sektoral</b>	100%	100%	100%			Meningkatnya Jumlah Dataset Statistik Sektoral yang Terintegrasi Setiap Tahun	Jumlah Total Dataset Statistik Yang Terintegrasi Per Tahun	1.600	1.600	2.800	4.000	7.000	9.000	9.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan integrasi data statistik sektoral Pemerintah Daerah	Persentase data statistik sektoral OPD yang terintegrasi
			<b>indeks keamanan informasi</b>	Tingkat 3 / Cukup	Tingkat 4 / Baik	Tingkat 4 / Baik			Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Status Kesiapan Keamanan Informasi : - Baik - Cukup Baik - Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar - Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	Baik	Baik	Baik	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI</b>	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi	Status Kesiapan Keamanan Informasi : - Baik - Cukup Baik - Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar - Tidak Layak
									Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Nilai dan Predikat SAKIP OPD	B	B	BB (71,51)	BB (75,50)	BB (76,00)	BB (77,00)	BB (77,00)	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Terselenggaranya urusan Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemprov. Kalbar	1. Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun tepat waktu
										2. Indeks RB OPD	85,00%	88,90% (32,27)	88,90% (32,27)	88,95%	88,97%	89,00%	89,00%			2. Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP
																				3. Persentase pelayanan administrasi kepegawai sesuai prosedur
																				4. persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar

TABEL 6.1  
CASCADING PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR

PROGRAM										KEGIATAN								SUB KEGIATAN											
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target						
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik perangkat daerah	persentase OPD dengan zona hijau / nilai 85 - 100	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya pengelolaan pelayanan informasi dan pembinaan PPIID Pembantu di lingkungan Penprov Kalbar dan PPIID Kabupaten/ Kota	Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dan OPD di Lingkungan Penprov Kalbar yang membentuk PPIID dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penusunan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terselenggaranya peraturan tingkat daerah di bidang informasi dan komunikasi publik yang tersusun	Jumlah peraturan tingkat daerah di bidang informasi dan komunikasi publik yang tersusun	/A	/A	/A	/A	/A	/A	/A	
																			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase informasi dan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	100%	Rp. 224.629.277	/A	/A	/A	/A	/A	
																			Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya pembinaan dan monitoring pelaksanaan dan penilaian keterbukaan informasi publik	1) Jumlah anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi KalimantanBarat yang dilantik periode 2022 - 2025 2) Jumlah Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi Penyiaran IndonesiaDaerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat periode 2022 - 2025 3) Jumlah KPID yang mendapat Hibah	1) - 2) - 3) 1 Komisi	Rp. 1.202.740.679	1) 7 orang 2) 1 kegiatan 3) 1 Komisi	Rp. 1.323.014.747	/A	/A	/A	/A
																			Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terselenggaranya dukungan fasilitasi dan pendampingan komisi informasi daerah	Jumlah KI yang mendapat Hibah	1 Komisi	Rp. 1.000.000.000	1 Komisi	Rp. 1.000.000.000	1 Komisi	Rp. 1.000.000.000	1 Komisi	Rp. 1.000.000.000
																			Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan di bidang informasi publik	Jumlah peralatan pendukung kegiatan di bidang informasi - yang tersedia	/A	/A	/A	/A		paket	Rp. 50.000.000	
																				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terselenggaranya inventarisasi dan dokumentasi opini dan aspirasi publik di media massa	1) Jumlah opini dan aspirasi publik di media massa yang diinventarisir dan didokumentasikan 2) Jumlah Buletin yang tersedia dalam menyampaikan informasi publik	350 opini	Rp. 148.285.315	400 opini	Rp. 163.113.847	1) 450 opini 2) Buletin 2 Edisi	Rp. 380.000.000	
																				Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya tindak lanjut aduan dari masyarakat melalui layanan online dan offline	1) Jumlah Badan Publik yang sudah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik 2) Jumlah Infografis RLPPD yang dipublikasikan kepada masyarakat 3) Jumlah kegiatan Pembangunan Kalimantan Barat yang diliput, didokumentasikan dan dipublikasikan 4) Jumlah anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang dilantik periode 2022 - 2026 5) Jumlah Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat periode 2022 - 2026 6) Jumlah KPID yang mendapat Hibah 7) Jumlah Website PPIID Utama yang dikelola	1) - 2) - 3) - 4) - 5) -	Rp. 76.563.096	1) 14 PPIID Kab/Kota dan 45 PPIID OPD Prov. Kalbar 2) 1 infografis RLPPD 3) 220 Berita 4) 5 orang 5) 1 Kegiatan	Rp. 462.525.600	1) 14 PPIID Kab/Kota dan 45 PPIID OPD Prov. Kalbar 2) 1 infografis RLPPD 3) 240 Berita 4) 5 - 5) - 6) 1 Komisi 7) 1 Website	Rp. 1.608.778.160	

PROGRAM										KEGIATAN										SUB KEGIATAN										
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target							
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.		
	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan komunikasi publik perangkat daerah	Persentase media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	51,09%	51,09%	60,85%	80%	100%	100%	100%	Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kalimantan Barat yang dibina	persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kalimantan Barat yang dibina	51%	51%	75%	51%	75%	100%	100%	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	100%	Rp	270.766.085	100%	Rp	297.842.694	100%	Rp	327.626.963
										Terselenggaranya Pengelolaan media komunikasi publik oleh OPD	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya informasi melalui Media Sosial dan Website	1) Jumlah Informasi Publik yang diposting melalui Media Sosial 2) Jumlah berita dan informasi yang diposting melalui Website <a href="http://kalbarprov.go.id">http://kalbarprov.go.id</a> 3) Jumlah Website Pemprov Kalbar yang di kelola	1) 2256 Postingan 2) 500 Postingan	Rp	197.764.409	1) 2256 Postingan 2) 500 Postingan	Rp	217.540.850	1) 2256 Postingan 2) 500 Postingan 3) 1 Website	Rp	339.294.935
																			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Publikasi Kegiatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalbar ke Masyarakat	Jumlah Publikasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalbar ke Masyarakat	6 Publikasi	Rp	130.209.861	7 Publikasi	Rp	143.230.847	8 Publikasi	Rp	200.000.000
																			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM di bidang Komunikasi Publik	1) Jumlah SDM yang ditingkatkan 2) Jumlah Rapat Badan Koordinasi Teknis Kehumasan 14 Kota se-Kalbar yang dilaksanakan dalam setahun	1) 52 Peserta 2) 2 Rakor	Rp	43.351.291	1) 225 Peserta 2) 1 Rakor	Rp	108.204.000	1) 250 Peserta 2) 2 Rakor	Rp	250.000.000
																			Layanan Hubungan Media	Terlaksananya layanan hubungan media terkait literasi peraturan ITE untuk media dan masyarakat	Jumlah Media yang terlayani - Media Elektronik - Media Cetak - Media Online	150 Peserta	Rp	176.059.809	150 Peserta	Rp	193.665.790	49 Media	Rp	500.000.000
<b>PROGRAM PENGELOAAN APLIKASIN INFORMATIKA</b>	Terselenggaranya implementasi tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang optimal	persentase total bobot domain evaluasi SPBE	NA	NA	NA	60%	65%	70%	70%	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase domain dan subdomain terlayani	98%	Rp	45.425.993	100%	Rp	100.000.000	100%	Rp	110.000.000
																			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Intra dan akses internet di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1) Jumlah OPD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2) Jumlah akses internet OPD yang terlayani	1) 44 OPD 2) 11 OPD	Rp	7.373.929.763	1) 34 OPD 2) 34 OPD	Rp	7.902.140.000	1) 34 OPD 2) 34 OPD	Rp	8.692.354.000
																			Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Terfasilitasinya penyediaan Nama Domain Pemprov. Kalbar	Persentase Penyediaan Nama Domain Pemprov. Kalbar yang terfasilitasi	NA	NA	100%	Rp	50.000.000	100%	Rp	60.000.000	



PROGRAM										KEGIATAN										SUB KEGIATAN										
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target							
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.		
									Pengelolaan government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Dasar SPBE	Jumlah Layanan Dasar SPBE	4 layanan : hosting, email, sub domain, datacloud	Rp	55.006.650	4 layanan : Email, hosting, subdomain dan datacloud	Rp	100.000.000	7 layanan : hosting, email, sub domain, datacloud, vidcon, absensi elektronik, colocation	Rp	110.000.000
																			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersusunnya peraturan pedoman tata kelola SPBE Pemprov Kalbar	Jumlah peraturan pedoman tata kelola SPBE Pemprov Kalbar yang disusun	1 Pergub	Rp	108.692.757	1 Pergub	Rp	50.000.000	1 Pergub	Rp	55.000.000
																			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Workshop / Bimbingan Teknis Jaringan dan Coding dan Sosialisasi Hosting, Email, dan Cloud	1) Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK Pemerintah Daerah 2) Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK Pemerintah Daerah	1) 1 kali 2) 2 kali	Rp	46.279.279	1) 50 Peserta 2) 50 Peserta	Rp	74.464.900	1) 50 Peserta 2) 50 Peserta	Rp	85.000.000
																			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya pengelolaan TIK di lingkungan Pemrov Kalbar	Jumlah TIK OPD di lingkungan Pemprov Kalbar yang dikelola	47 OPD	Rp	65.030.865	38 OPD	Rp	84.672.100	38 OPD	Rp	110.000.000
																			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Server yang dikelola di Pusat Data Pemprov Kalbar	Jumlah server yang dikelola di Pusat Data Pemprov Kalbar	19 unit server	Rp	429.423.688	18 unit server	Rp	479.280.400	30 unit server	Rp	3.000.000.000
																			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1) Jumlah Aplikasi yang dibangun / dikembangkan 2) Jumlah Video yang dibuat	1) 5 aplikasi 2) -	Rp	332.934.013	1) 9 aplikasi 2) 2 video	Rp	1.160.287.500	1) 10 aplikasi 2) 3 video	Rp	1.300.000.000
																			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terselenggaranya integrasi sistem informasi penghubung layanan pemerintah	Jumlah sistem penghubung layanan elektronik pemerintah yang dikelola	1 sistem penghubung	Rp	50.408.051	1 sistem penghubung	Rp	60.000.000	1 sistem penghubung	Rp	70.000.000
																			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	1. Jumlah Ruang Data Centre yang dikelola 2. Jumlah portal aplikasi pelayanan publik yang dikelola	12 Laporan	Rp	703.795.468	2 Ruang Data	Rp	1.000.000.000	1) 2 Ruang Data 2) 1 Portal Layanan Publik	Rp	1.300.000.000
																			Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terselenggaranya Pengamanan sistem informasi	Persentase Sistem Informasi Yang Diamankan	N/A	N/A	100%	Rp	600.000.000	100%	Rp	300.000.000	

PROGRAM										KEGIATAN							SUB KEGIATAN											
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target					
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.
																		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Penilaian Indeks SPBE	Tersusunnya Laporan Penilaian Indeks SPBE	A/4	A/4	1 Laporan	Rp. 60.000.000	1 Laporan	Rp. 70.000.000		
																		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Virtual Meeting Terlayani	A/4	A/4	100%	Rp. 107.513.900	100%	Rp. 118.265.290		
																		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terselenggaranya Inventarisasi Data Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika pada wilayah 3T dan Kab/Kota se-Kalimantan Barat	Jumlah Data Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika pada wilayah 3T dan Kab/Kota se-Kalimantan Barat yang diinventarisir	Data 5 kabupaten	Rp. 17.176.725	Data 5 kabupaten	Rp. 60.650.800	Data 14 kabupaten	Rp. 110.000.000		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Terselenggaranya Pembinaan dan pengelolaan integrasi data statistik sektoral Pemerintah Daerah	Persentase data statistik sektoral OPD yang terintegrasi	70%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1) Terlaksananya Pengolahan Data Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2) Terlaksananya Analisis Data Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 3) Tersedianya Buku Kalimantan Barat Dalam Angka 4) Tersedianya Buku Statistik Sektoral Kalimantan Barat 5) Tersedianya Buku Daftar Data Prioritas	1) Jumlah Data Statistik Sektoral OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dikumpulkan 2) Jumlah Analisis Data Statistik Sektoral OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diolah dan di analisis Dalam Angka yang tersedia 4) Jumlah Buku Statistik Sektoral Kalimantan Barat yang tersedia 5) Jumlah Buku Daftar Data Prioritas	1) 47 data OPD 2) 47 data OPD 3) 70 buku KDA 4) 20 buku SS 5) 50 buku DDP	Rp. 225.872.305	1) 38 data OPD 2) 38 data OPD 3) 20 buku KDA 4) 0 buku SS 5) 0 buku DDP	Rp. 248.459.536	1) 38 data OPD 2) 38 data OPD 3) 70 buku KDA 4) 50 buku SS 5) 50 buku DDP	Rp. 350.000.000			
																	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Standar Metadata Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Buku Standar Metadata Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tersusun	20 buku	Rp. 117.954.756	25 buku	Rp. 129.750.232	50 buku	Rp. 142.725.255			
																	Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	47 OPD	Rp. 71.372.168	1 Kali	Rp. 78.509.385	1 Kali	Rp. 86.360.323			
																	Penyelenggaraan Otorisasi dan Fungsi Wali Data Statistik Sektoral di Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Peran dan Fungsi Wali Data Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dioptimalisasikan Peran dan Fungsi Wali Data Statistik Sektoral	47 OPD	Rp. 86.996.245	38 OPD	Rp. 95.695.870	38 OPD	Rp. 105.265.456			
																	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlatihnya SDM di bidang statistik	Jumlah SDM di Bidang Statistik yang dilatih - 38 OPD - 14 Kabupaten/Kota	A/4	A/4	52 orang	Rp. 100.000.000	104 orang	Rp. 110.000.000			

PROGRAM										KEGIATAN										SUB KEGIATAN										
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target							
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.		
																			Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya infrastruktur aplikasi statistik sektoral terintegrasi	Jumlah Website integrasi Statistik Sektoral yang di kelola (Portal Satu Data)	A4	A4	NA	NA	1 Website	Rp	150.000.000		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi	Status Kesiapan Keamanan Informasi : - Baik - Cukup Baik - Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar - Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	Baik	Baik	Baik	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di OPD	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di OPD	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1) Terlaksananya Pembinaan Pengamanan Data Informasi dan Komunitas Keamanan Informasi di Kalimantan Barat 2) Terlaksananya Pembinaan Data Keamanan Informasi se-Kalbar untuk mendukung Indeks KAMI 3) Terlaksananya Sterilisasi Tempat Strategis Untuk Pengamanan Informasi Daerah	1) Jumlah Kabupaten yang dibina dalam Pengamanan Data Informasi dan Komunitas Keamanan Informasi di Kalimantan Barat 2) Jumlah OPD yang dibina dalam Keamanan Informasi dan data se-Kalbar untuk mendukung Indeks KAMI 3) Jumlah Sterilisasi Tempat Strategis Untuk Pengamanan Informasi Daerah	1) 4 kabupaten/kota 2) 47 OPD 3) ruang kerja pimpinan / 1 tahun	Rp	59.993.408	1) 14 Kab/Kota 2) 38 OPD 3) 2 ruang kerja pimpinan	Rp	100.000.000	1) 14 Kab/Kota 2) 38 OPD 3) 2 ruang kerja pimpinan	Rp	110.000.000
																			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1) Terlaksananya Penyelenggaraan Dukungan Persandian Untuk Informasi Daerah 2) Terbentuk dan beroperasinya Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang dibentuk dan beroperasi untuk 1 tahun 3) Jumlah Pejabat dan ASN yang memiliki Tanda Tangan Elektronik	1) Jumlah Kabupaten / Kota pada penyelenggaraan Dukungan Persandian Untuk Informasi Daerah 2) Jumlah Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang dibentuk dan beroperasi untuk 1 tahun 3) Jumlah Pejabat dan ASN yang memiliki Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1) 4 kabupaten/kota 2) - 3) -	Rp	238.167.463	1) 14 kabupaten/kota 2) 1 Tim CSIRT 3) 150 Orang	Rp	261.984.209	1) 14 kabupaten/kota 2) 1 Tim CSIRT 3) 150 Orang	Rp	288.182.630
																			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	tersusunnya produk hukum daerah di bidang persandian	Jumlah produk hukum daerah di bidang persandian yang disusun	A4	A4	1 produk hukum daerah	Rp	75.000.000	1 produk hukum daerah	Rp	75.000.000	
																			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersusunnya analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi	Jumlah dokumen inventarisasi analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang disusun	A4	A4	1 dokumen	Rp	75.000.000	1 dokumen	Rp	75.000.000	
																			Operasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1) Terlaksananya Pembinaan dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Persandian / Sanapati Perangkat Daerah 2) Tersedia dan beroperasinya layanan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah	1) Jumlah OPD Penggunaan Layanan email dan Persandian / Sanapati Perangkat Daerah 2) Jumlah perangkat layanan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah yang tersedia dan beroperasi	A4	A4	1) 38 Email Sanapati OPD 2) 1 perangkat JKS	Rp	200.000.000	1) 38 Email Sanapati OPD 2) 1 perangkat JKS	Rp	100.000.000	

PROGRAM										KEGIATAN							SUB KEGIATAN														
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target								
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya urusan Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemprov. Kalbar	1. Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan yang disusun : 1. Analisis Resiko 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tingkat Kabupaten / Kota, Provinsi dan Nasional 3. Forum OPD 4. Perjankin 5. RENJA 6. SIRUP	6 Dokumen dan 12 Laporan	Rp	102.954.419	7 Dokumen dan 12 Laporan	Rp	178.127.500	7 Dokumen dan 12 Laporan	Rp	195.940.250	
																			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp	15.794.907	1 Dokumen	Rp	17.374.398	1 Dokumen	Rp	19.111.837	
																				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD yang disusun	NA	NA	1 Dokumen	Rp	17.374.398	1 Dokumen	Rp	19.111.837	
																				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun	NA	NA	1 Dokumen	Rp	30.000.000	1 Dokumen	Rp	33.000.000	
																				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp	14.831.392	1 Dokumen	Rp	30.000.000	1 Dokumen	Rp	33.000.000
																				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun : 1. LAKIP 2. LPPD 3. LKPJ	3 dokumen	Rp	40.000.000	3 dokumen	Rp	44.305.300	3 dokumen	Rp	48.735.830
																				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Bulanan Perangkat Daerah dan tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun : 1. Laporan Bulanan Realisasi Pengukuran Kinerja / e-kinerja 2. Simonev 3. RPK (Realisasi Fisik dan Keuangan) 4. e-SAKIP Reviu 5. TEPPRA	1 Dokumen dan 40 Laporan	Rp	16.922.840	1 Dokumen dan 40 Laporan	Rp	227.331.800	1 Dokumen dan 40 Laporan	Rp	250.064.980
		2. Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Diskominfo Prov. Kalbar	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar Diskominfo Prov. Kalbar	55 ASN	Rp	7.669.339.402	55 ASN	Rp	7.855.658.405	55 ASN	Rp	8.641.224.246	
																		Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Tersedianya administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	Rp	5.200.000	100%	Rp	5.720.000	12 Bulan	Rp	6.292.000		

PROGRAM										KEGIATAN										SUB KEGIATAN									
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target						
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	
																			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya penatausahaan keuangan, barang dan jasa kantor	Persentase penatausahaan keuangan, barang dan jasa kantor	100%	Rp. 1.472.090.400	100%	Rp. 1.619.299.440	12 Bulan	Rp. 1.781.229.384		
																			Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akutansi SKPD	12 Laporan	Rp. 56.508.156	12 Laporan	Rp. 62.158.972	12 Laporan	Rp. 68.374.869		
																			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	A/4	A/4	1 Dokumen	Rp. 30.000.000	1 Dokumen	Rp. 33.000.000		
																			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersusumnya dokumen TLHP	Jumlah dokumen TLHP yang disusun	1 Dokumen	Rp. 18.839.492	1 Dokumen	Rp. 20.723.441	1 Dokumen	Rp. 22.795.785		
																			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusumnya laporan keuangan triwulan, laporan semester dan tahunan	Jumlah laporan keuangan triwulan, laporan semester dan tahunan yang disusun	6 dokumen Laporan	Rp. 22.842.384	6 dokumen Laporan	Rp. 25.126.622	6 dokumen Laporan	Rp. 27.639.285		
																			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	A/4	A/4	1 Dokumen	Rp. 25.000.000	1 Dokumen	Rp. 27.500.000		
		<b>3. Persentase pelayanan administrasi kepegawai sesuai prosedur</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	A/4	A/4	100%	Rp. 50.000.000	100%	Rp. 60.000.000		
																			Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakalan Dinas Harian / PDH yang diadakan	Jumlah Pakalan Dinas Harian/ PDH yang diadakan	1 Paket	Rp. 61.346.750	Paket	Rp. 67.481.425	Paket	Rp. 74.229.568		
																			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Tersedianya dokumen Penilaian Angka Kredit Terhadap Pranata Humas/Pranata Komputer dan Terkelolanya dokumen administrasi kepegawain	1. Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain 2. Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kredit Terhadap Pranata Humas 3. Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kredit Terhadap Pranata Komputer	1 Dokumen	Rp. 123.880.191	3 Dokumen	Rp. 136.268.210	3 Dokumen	Rp. 149.895.031		

PROGRAM										KEGIATAN								SUB KEGIATAN																							
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET						SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target																			
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023				Kondisi Akhir	2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.													
																		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang disusun	A/4	A/4	1 Dokumen	Rp	30.000.000	1 Dokumen	Rp	33.000.000													
																	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dalam 1 Tahun	A/4	A/4	1 Dokumen	Rp	30.000.000	1 Dokumen	Rp	33.000.000														
																	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Laporan Pemulangan Pegawai yang Pensiun dalam 1 tahun	A/4	A/4	1 Dokumen	Rp	30.000.000	1 Dokumen	Rp	33.000.000														
																	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	A/4	A/4	1 Dokumen	Rp	30.000.000	1 Dokumen	Rp	33.000.000														
																	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pemindahan Tugas ASN	A/4	A/4	1 Dokumen	Rp	30.000.000	1 Dokumen	Rp	33.000.000														
																	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	Rp	32.500.000	100%	Rp	35.750.000	100%	Rp	39.325.000													
																	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PNS yang mengikuti sosialisasi	Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi	100%	Rp	10.000.000	100%	Rp	15.000.000	100%	Rp	16.500.000													
																	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis	Persentase PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis	100%	Rp	13.000.000	100%	Rp	15.000.000	100%	Rp	16.500.000													
		<b>4. persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	A/4	A/4	1 Dokumen	Rp	28.777.200	1 Dokumen	Rp	31.654.920														
																	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	A/4	A/4	1 Dokumen	Rp	25.000.000	1 Dokumen	Rp	27.500.000														
																	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	A/4	A/4	1 Dokumen	Rp	25.000.000	1 Dokumen	Rp	27.500.000														

PROGRAM										KEGIATAN								SUB KEGIATAN																				
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target															
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.										
																			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian Barang Milik Daerah yang disusun	A4	A4	1 Dokumen	Rp. 25.000.000	1 Dokumen	Rp. 27.500.000											
																			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	A4	A4	1 Dokumen	Rp. 25.000.000	1 Dokumen	Rp. 27.500.000											
																			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun	A4	A4	1 Dokumen	Rp. 25.000.000	1 Dokumen	Rp. 27.500.000											
																			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang disusun	A4	A4	1 Dokumen	Rp. 25.000.000	1 Dokumen	Rp. 27.500.000											
																			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawai sesuai prosedur	Persentase pelayanan administrasi kepegawai sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Rp. 39.044.000	100%	Rp. 42.948.400	100%	Rp. 47.243.240
																			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp. 61.040.266	100%	Rp. 67.144.293	100%	Rp. 73.858.722											
																			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	100%	Rp. 8.887.728	100%	Rp. 9.776.501	100%	Rp. 10.754.151											
																			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Persentase tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	100%	Rp. 55.080.000	100%	Rp. 60.588.000	100%	Rp. 66.646.800											
																			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Rp. 37.426.000	100%	Rp. 41.168.600	100%	Rp. 45.285.460											
																			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan berlangganan yang disediakan dalam setahun terdiri dari 2 koran dan 3 bacaan digital	5 jenis/bulan	Rp. 6.400.000	5 jenis/bulan	Rp. 7.040.000	5 jenis/bulan	Rp. 7.744.000											
																			Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Bahan/ Material	Persentase Penyediaan Bahan/Material	A4	A4	100%	Rp. 50.000.000	100%	Rp. 55.000.000											

PROGRAM										KEGIATAN										SUB KEGIATAN																		
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target															
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.										
																			Facilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	A/4	A/4	100%	Rp. 30.000.000	100%	Rp. 33.000.000											
																			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah dalam 1 tahun	1 Dokumen	Rp. 98.021.437	1 Dokumen	Rp. 107.823.581	1 Dokumen	Rp. 118.605.939											
																			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp. 16.027.544	1 Dokumen	Rp. 17.630.298	1 Dokumen	Rp. 19.393.328											
																			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website OPD yang di kelola	NA	NA	NA	NA	1 Website	Rp. 100.000.000											
																			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	A/4	A/4	4 motor	Rp. 100.000.000	4 motor	Rp. 110.000.000
																			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	A/4	A/4	4 motor	Rp. 100.000.000	4 motor	Rp. 110.000.000											
																			Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel	Persentase tersedianya Mebelair kantor	A/4	A/4	100%	Rp. 100.000.000	100%	Rp. 110.000.000											
																			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 mesin	Rp. 65.674.540	3 mesin	Rp. 72.241.994	3 Mesin	Rp. 79.466.193											
																			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Aset Tetap Lainnya	A/4	A/4	1 paket	Rp. 50.000.000	1 paket	Rp. 55.000.000											



PROGRAM										KEGIATAN						SUB KEGIATAN													
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET						SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target							
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023				Kondisi Akhir	2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	
																		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Paket Pengadaan Aset Tak Berwujud	A4	A4	1 Paket	Rp	50.000.000	1 Paket	Rp	55.000.000	
																		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	A4	A4	Paket	Rp	100.000.000	Paket	Rp	110.000.000	
																		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	A4	A4	1 Paket	Rp	100.000.000	1 Paket	Rp	110.000.000	
																		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Paket pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	Rp	99.997.788	1 Paket	Rp	109.997.567	1 Paket	Rp	120.997.323
																		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang tersedia	100%	Rp	1.991.925	100%	Rp	2.191.118	100%	Rp	2.410.229
																		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Rp	216.500.000	100%	Rp	238.150.000	100%	Rp	261.965.000
																		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100%	Rp	8.400.000	100%	Rp	9.240.000	100%	Rp	10.164.000
																		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani, Kebersihan Kantor dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik melalui PPID Pembantu di OPD	1) Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan Jasmani dan Rohani, 2) Jumlah Gedung Kantor yang mendapat jasa kebersihan 3) Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang disusun Pembantu di OPD 4) Jumlah PTT ( Pegawai Tidak Tetap) Diskominfo Prov. Kalbar yang di pekerjakan	1) 54 ASN 2) 1 Gedung 3) 1 Dokumen Laporan 4) 37 PTT	Rp	260.205.561	1) 95 pegawai 2) 1 Gedung 3) 1 Dokumen Laporan 4) 37 PTT	Rp	286.226.117	1) 95 Pegawai 2) 1 Gedung 3) 1 Dokumen Laporan 4) 37 PTT	Rp	314.848.729

PROGRAM										KEGIATAN										SUB KEGIATAN										
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target							
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.		
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang mendapat jasa pemeliharaan, dan pajak yang dibayarkan	1) 2 mobil dan 2 motor	Rp.	NA	1) 2 mobil dan 2 motor	Rp.	80.000.000	1) 2 mobil dan 2 motor	Rp.	88.000.000
																			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 dan Roda 2	1) Jumlah kendaraan dinas Roda 2 yang dibayar pajaknya 2) Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dibayar pajaknya	5 mobil dan 5 motor	Rp.	85.840.000	1) 5 motor 2) 5 mobil	Rp.	94.424.000	1) 5 motor 2) 5 mobil	Rp.	103.866.400
																			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang mendapat Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
																			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat yang mendapat Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
																			Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang mendapat biaya pemeliharaan	NA	NA	1 Tahun	Rp.	20.000.000	1 Tahun	Rp.	22.000.000	
																			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan AC/kipas angin, pemeliharaan Komputer, Printer, alat studio dan komunikasi, dan Generator	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat biaya Pemeliharaan terdiri dari : AC (45 Unit), Komputer (81 Unit), Printer (43 Unit), Genset (1 unit)	170 unit	Rp.	112.105.200	170 unit	Rp.	123.315.720	170 unit	Rp.	135.647.292
																			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang mendapat pemeliharaan	NA	NA	1 Paket	Rp.	20.000.000	1 Paket	Rp.	22.000.000	
																			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang mendapat pemeliharaan	NA	NA	1 Paket	Rp.	20.000.000	1 Paket	Rp.	22.000.000	

PROGRAM										KEGIATAN							SUB KEGIATAN											
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target					
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.
																		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang mendapat biaya pemeliharaan	1 Gedung	Rp. 10.000.000	12 bulan	Rp. 11.000.000	12 bulan	Rp. 12.100.000		
																		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan	n/a	A4	1 Sarpras	Rp. 80.000.000	1 Sarpras	Rp. 88.000.000		
																		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	A4	A4	1 Sarpras Pendukung	Rp. 80.000.000	1 Sarpras Pendukung	Rp. 88.000.000		



## **6.2. Pendanaan Indikatif**

Pendanaan indikatif bagi program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat.



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dapat terlihat pada tabel 7.1

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Provinsi Kalimantan Barat**

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDIS I AKHIR
	KONDIS I AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	
predikat dan nilai keterbukaan informasi publik	Informatif 90 - 100	Informatif 90 - 100	Informatif 90 - 100	Informatif / Zona Hijau 90 -100	Informatif / Zona Hijau 90 -100	Informatif / Zona Hijau 90 -100	Informatif / Zona Hijau 90 -100
Nilai SPBE Pemerintah Daerah	2,60	2,60	2,60	2,60-3,50	2,60-3,50	3,50-4,20	3,50-4,20
Jumlah Total Dataset Statistik Yang Terintegrasi Per Tahun	1.600	1.600	2.800	4.000	7.000	9.000	9.000
Status Kesiapan Keamanan Informasi : - Baik - Cukup Baik - Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar - Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	Baik	Baik	Baik
Nilai dan Predikat SAKIP OPD	B	B	BB (71,51)	BB (75,50)	BB (76,00)	BB (77,00)	BB (77,00)
Indeks RB OPD	85,00%	88,90% (32,27)	88,90% (32,27)	88,95%	88,97%	89,00%	89,00%



## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan memuat penyesuaian perencanaan berbasis kinerja karena adanya perubahan terkait penyusunan perencanaan berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang memberikan panduan terhadap hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul. RENSTRA Perubahan ini menjadi acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka mencapai indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja dan target Kepala Daerah, khususnya untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat terkait Urusan Komunikasi dan Infomatika, Persandian dan Statistik.

Rencana Strategis Perubahan ini juga memuat isu-isu pokok yang penting, mendasar dan mendesak terkait Urusan Komunikasi dan Infomatika, Persandian dan Statistik. Akhir kata, semoga Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dapat di laksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten. Semoga saja Renstra Perubahan yang disusun ini dapat memberikan daya dan hasil guna bagi peningkatan akuntabilitas instansi sebagai upaya ***"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good Government"***.

Pontianak, Februari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



**SAMUEL, SE, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19660408 199303 1 009